

## E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan *E-government* di Indonesia Tahun 2003-2020

Junior Hendri Wijaya<sup>1\*</sup>, Sutoro Eko Yunanto<sup>2</sup>, Yuli Setyowati<sup>3</sup>, Supardal<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
"APMD" Yogyakarta, Indonesia  
\*email corespondensi: [jrhendriwijaya@gmail.com](mailto:jrhendriwijaya@gmail.com)

### Citation:

Wijaya, JH\*, Eko, Sutoro Yunanto, Setyowati, yuli, Supardal. (2021). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan *E-government* di Indonesia Tahun 2003-2020: Studi Pustaka. *Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 1 - 8. doi: Prefix [10.32669](https://doi.org/10.32669)

Editor: Yusuf Adam Hilman

Received: 10 Desember 2021

Accepted: 14 Januari 2022

Published: 14 Februari 2022

Publisher's Note: Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). (Platino Linotipe, 9pt, di isi editor).

**Abstrak:** Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia, maka diperlukan kajian tentang e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis isi. Temuan penelitian adalah bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan e-government itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

**Kata kunci:** Partisipasi; Masyarakat; *E-government*;

**Abstract:** The importance of public participation in the implementation of e-government in Indonesia, it is necessary to study public participation in the implementation of e-government in Indonesia in 2003-2020. The purpose of this paper is to describe public participation in the implementation of e-government in Indonesia in 2003-2020. The method used is qualitative with content analysis. The research finding is that the implementation of e-participation may not necessarily show full community involvement in the implementation of e-government. The implementation of e-participation can show full community participation if it is followed by the government's efforts to provide good telecommunications infrastructure, according to the data obtained by the researchers in the EDGI which states that from 2003 to 2020, TII always had the lowest points among the two EDGI components that others, namely HCI and OSI. The intervention of power in government in governance and e-government exists, but what is more dominant is the desire to make good governance so that services to the community can be carried out effectively and efficiently.

**Keywords:** Participation; Public; e-government;

## 1. Pembahasan

*E-government* merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Setiawan, 2015).

Menurut (Kaligis et al., 2021) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

### a) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

### b) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh (Dwiningrum, 2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan

masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu.

---

Melihat pentingnya dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu dikaji penelitian tentang bagaimana e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020.

## **2. Metode**

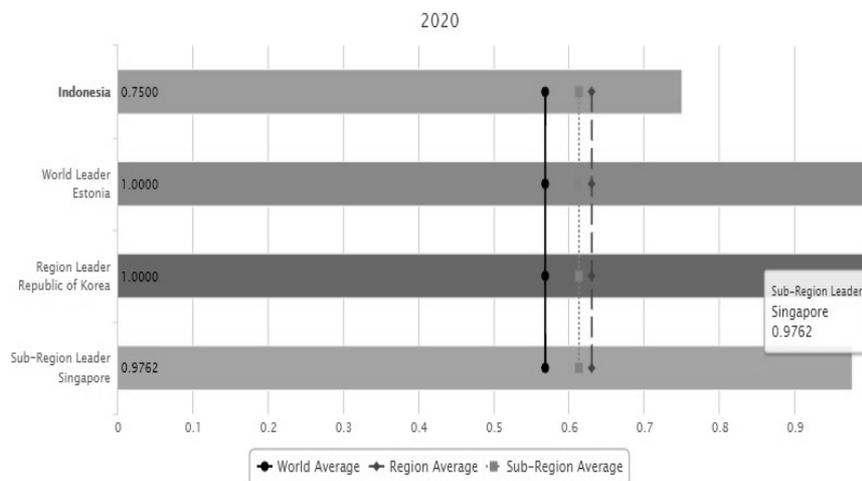
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analysis*.

## **3. Data dan Pembahasan**

Partisipasi dan transparansi merupakan kelebihan *e-government* untuk melebur sekat pemisah di antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia (Akbar et al., 2021). Hal ini berhubungan dengan transparansi, (Sabani, 2020) mengatakan bahwa transparansi ditemukan menjadi faktor terkuat yang mempengaruhi keputusan warga negara Indonesia untuk mengadopsi *e-government*. Bahkan dalam penelitian (Zuhroh, 2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan *e-government* memiliki dampak yang positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003.

Selanjutnya, penerapan *e-government* memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas praktik korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia (Maria & Halim, 2021; Ika Yuliyana, 2016). Oleh karena itu, penerapan *e-government* yang baik, kecil kemungkinan pemerintah daerah terlibat dalam korupsi. Selain itu, informasi publik yang transparan dan jujur akan mudah disaat jika pemerintah daerah menggunakan *e-government*, sehingga keadaan yang tidak seimbang mengenai informasi antara agen dan prinsipal dapat dikurangi (Maria & Halim, 2021). Penerapan *e-government* dapat mempermudah akses kepada pemerintah, memberi kesederhanaan prosedur pelayanan, dan meminimalisir kontak langsung dengan agen pemerintahan sehingga praktik korupsi dapat dikurangi. Selanjutnya, semakin majunya dimensi infrastruktur, makan dapat memperluas cakupan *e-government* sehingga dapat mewujudkan fase transaksi, di mana transaksi pemerintah, pegawai, masyarakat secara luas, dan sektor bisnis dilakukan melalui mekanisme *e-government* (Ika Yuliyana, 2016).

Melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* melalui kerangka *governance*, peneliti mencoba mengkaji pelaksanaan *e-participation*. Berikut ini adalah *e-participant Index* yang peneliti sajikan melalui gambar 1:



Gambar 1 Indonesia *E-participant* Index Tahun 2020

Data di atas menunjukkan posisi Indonesia dalam *e-participation*. Tingkat ketercapaian Indonesia dalam hal ini adalah 0,7500. Angka tersebut mengantarkan Indonesia pada kelompok *Very High E-government Development Index* (EGDI). Hal tersebut karena nilai yang didapatkan Indonesia berada di angka 0,75 ke atas, sesuai dengan pengukuran EGDI. Peneliti menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam ranah publik melalui penggunaan *e-government* telah mampu mengikuti kebutuhan pelaksanaan *e-government*. Pada dasarnya, keberadaan partisipasi masyarakat dalam kesuksesan program dan kebijakan sehubungan dengan *e-government*, merupakan dukungan paling besar yang dapat membawa Indonesia bersaing dengan negara lain. Selalu dibutuhkan kesesuaian antara program, kebijakan, dan strategi dengan partisipasi masyarakat. Terutama jika mengingat bahwa *e-government* sangat mengandalkan kekuatan ‘jaringan’ dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejauh mana

pemerintah Indonesia akan mampu mempertahankan partisipasi masyarakat dalam *e-government*, juga bergantung pada kemampuannya dalam memberikan ‘literasi’ terkait *e-government*. apalagi, dari masa ke masa, perkembangan *e-government* sangat pesat. Tidak hanya berbicara tentang website resmi pemerintah, tetapi keterbukaan informasi bahkan dapat diakses melalui media sosial. Hal ini membuat transparansi yang diharapkan semakin mudah didapatkan. Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk melihat, menilai, melakukan monitoring, sekaligus evaluasi terhadap apa yang menjadi ‘pekerjaan’ pemerintah.

UN *Government Survey* menjadikan poin *e-participation* sebagai ukuran pelengkap EDGI. Berangkat dari fakta tersebut, penulis memahami bahwa baik *governance* ataupun *e-government* memiliki sebuah keharusan dalam pelibatan partisipasi masyarakat secara maksimal. Data yang berasal oleh UN *government Survey* telah dilakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Indonesia dari tahun 2018-2020, baru saja menunjukkan perubahan besar. Berikut ini data *e-participation* yang peneliti olah:

Tabel 1 Perbandingan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan SAKIP

E- Participation Index Indonesia	Tahun									
	2003	2004	2005	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020
Rank	41	32	34	135	86	66	110	114	92	57
Value	0.2586 0	0.2622 9	0.2857 1	0.0454 5	0.1285 7	0.2105 0	0.2941 1	0.3728 8	0.6180 0	0.7500 0

Pada tabel 1. menunjukkan bahwa kondisi e-partisipasi masyarakat di Indonesia masih naik turun dan belum stabil, terlihat data dari tahun 2003 berada di posisi ranking 41 dengan value 0.25860, yang kemudian naik peringkat ditahun 2004 posisi peringkat 32 dengan value 0.26229 dilanjutkan pada tahun 2005 keberadaan e-partisipasi Indonesia menurun peringkat di posisi 34 dengan value lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 0.28571, jika dilihat pada kondisi tahun 2008 e-partisipasi Indonesia turun jauh dengan posisi rangking 135 dengan value 0.04545 sehingga ini menunjukkan bahwa tingkat e-partisipasi jauh menurun dari tahun sebelumnya. Dilihat pada tahun 2010 keberadaan peringkat e-partisipasi Indonesia naik peringkat ke 86 dengan value 0.12857 sehingga lebih baik dari tahun 2008.

Selanjutnya pada tahun 2010 peringkat perkembangan e-partisipasi naik peringkat di posisi 66 dengan value 0.21050, namun pada tahun 2014 kembali turun peringkat yakni 110 dengan value 0.29411 bahkan menurun kembali di tahun 2016 dengan posisi peringkat 114 padahal dengan value 0.37288. Pada tahun 2018 posisi Indonesia naik peringkat ke 92 lebih baik dari tahun sebelumnya, hingga pada tahun 2020 posisi Indonesia di peringkat 57 dengan value lebih tinggi dari tahun ke tahun yaitu 0.75000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

tingkat partisipasi warga dalam inisiatif e-government masih kurang.

Untuk dapat melihat secara mudah naik turunnya posisi dan Indonesia dalam *e-participation*, peneliti menggambarannya dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2 Ranking Indonesia dalam *E-participation Index* Tahun 2003-2020



Gambar 3 Nilai Indonesia dalam E-participation Index Tahun 2003-2020

Dari gambar 2 terlihat fluktuasi nilai e-partisipasi Indonesia dari tahun 2003 sampai 2020. Indonesia pernah mengalami stagnasi dengan point yang hampir sama, lalu pernah mengalami penurunan pada tahun 2008, dan perlahan naik kembali hingga puncaknya di tahun 2020.

UN *Government Survey* disebutkan bahwa keberadaan e-partisipasi dalam *governance* berada pada tiga komponen, yaitu: pembuatan keputusan, konsultasi, dan penyediaan informasi. Pada dasarnya ketiga komponen inilah yang kemudian menjadi tolak ukur ketercapaian e-partisipasi, termasuk di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi langsung dalam ketiga komponen melalui penyerapan unsur-unsur e-government. Jika penulis teliti, hal ini termasuk

---

ke dalam jenis partisipasi langsung, di mana keberadaan masyarakat harus secara langsung digunakan dalam pencapaian komponen governance, terutama dalam komponen pembuatan kebijakan dan konsultasi. Pola hubungan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan e-partisipasi melalui e-government, adalah secara langsung, bahkan bisa lebih mudah dilakukan karena seluruh kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk internet. Hal ini sesuai dengan pendapat (Kaligis et al., 2021) bahwa partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

Pada penelitian (Napitupulu, 2015), dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam e-government di Indonesia, masih tergolong rendah, yaitu < 40%, sementara minat untuk mengikuti *e-participation* sangat tinggi >90%, dengan persepsi positif >99% (Napitupulu et al., 2019). Selain itu, pelaksanaan *E-participation* di Indonesia belum efektif dikarenakan terdapat gap antara layanan dan karena bentuknya yang dua arah, penanganan pengaduan, dan keterlibatan masyarakat yang belum berjalan dengan baik. Pengembangan *e-participation* akan sejalan dengan perkembangna e-

*government*, digital pemerintah, dan aturan untuk partisipasi konvensional (Susanti et al., 2021).

E-partisipasi dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *e-government* memiliki pola hubungan tersendiri. Peneliti meyakini bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan *e-government*. Pelaksanaan *e-participation* dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain. Padahal HCI Indonesia bisa dikatakan tinggi di setiap tahunnya. Jika partisipasi dan transparansi telah dipenuhi, maka variabel kepercayaan dapat dipastikan tercukupi (Permatasari et al., 2021).

Peneliti melihat kembali pendapat (Indrajit, 2006) yang mengatakan bahwa elemen value dalam tiga elemen sukses konsep digitalisasi pada sektor publik, merupakan penentu besar bermanfaat atau tidaknya *e-government* (Aprianty, 2016). Dengan demikian, tata kelola pemerintah Indonesia belum mampu melakukan pemenuhan akan elemen value yang menjadi penentu tersebut, karena sekalipun e-partisipasi

memperlihatkan nilai yang tinggi, tetapi partisipasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Penyebab utamanya adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapat (Nulhusna et al., n.d.), di mana kualitas sistem dan kualitas informasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepercayaan dalam kerangka keberhasilan sistem informasi.

Sehubungan dengan perubahan paradigma berpikir sehubungan dengan penerapan e-government, masyarakat Indonesia termasuk ke dalam pendukung yang netral, karena dalam pelaksanaan e-government, masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk berpartisipasi tetapi banyak yang pada akhirnya tidak melakukan karena alasan infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai. Selain itu terkadang masyarakat Indonesia bersikap apatis terhadap perubahan, dan sering kali memahami e-government hanya sebagai formalitas kebijakan pemerintah. Selanjutnya, dilihat dari EDGI dan *E-participation Index* perkembangan *e-government* di Indonesia tergolong lambat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lambat dalam menerima perubahan. Terakhir, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik memerlukan paksaan dalam pelaksanaan *e-government*. Hal ini sesuai dengan

teori milik Warren Bennis dan Michael Mische (Kumurur, 2012) tentang empat golongan perubahan paradigma berpikir sehubungan dengan penerapan e-government bahwa dalam pendukung yang bersifat netral, karakteristik yang dapat dilihat adalah menjauh, apatis, dan pasif, mungkin tertarik tapi tidak melakukan, lambat menerima perubahan, dan memerlukan campur tangan atau paksaan untuk memulai.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi dalam perkembangan e-government di Indonesia dengan jenis partisipasi langsung, di mana keberadaan masyarakat harus secara langsung digunakan dalam pencapaian komponen governance, terutama dalam komponen pembuatan kebijakan dan konsultasi. Pola hubungan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan e-partisipasi melalui e-government, adalah secara langsung, bahkan bisa lebih mudah dilakukan karena seluruh kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk internet.

Pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang

peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan *e-government* itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun, memang dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia membutuhkan usaha yang lebih dalam mendorong perkembangan *e-government*, terutama dari segi infrastruktur telekomunikasi, dan sumber daya yang kompeten.

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tulisan ini, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pembimbing yang sudah membantu peneliti dan terimakasih kepada Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa yang memberikan ruang untuk dapat mempublikasikan artikel ini.

#### **6. Daftar Pustaka**

Akbar, M. M., Winarno, W. W., & Haryono, K. (2021). Evaluasi Tingkat Kematangan *e-Government* Pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(1), 99–107. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2606>

Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan *e-government* dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589–1602.

---

Ika Yuliyana, A. (2016). *Pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi di kementerian/lembaga = The influence of e government implementation and accountability toward corruption perception in ministry institution / Ika Yuliyana.* Universitas Indonesia Library. <http://lib.ui.ac.id>

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi.* Jakarta: Aptikom.

Kaligis, M. F., Tulusan, F., & Ruru, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Ii Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).

Kumurur, V. (2012). Penerapan E-Government Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia (Tanggapan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003). *EKOTON*, 8(2).

Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.

Napitupulu, D. (2015). Kajian faktor sukses implementasi e-government studi kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(3), 229–236.

Napitupulu, D., Adiyarta, K., & Albar. (2019). Public Participation Readiness Toward E-Gov 2.0: Lessons from Two Countries. *Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 240–243. <https://doi.org/10.1145/3326365.3326397>

Nulhusna, R., Sandhyaduhita, P. I., Hidayanto, A. N., & Phusavat, K. (n.d.). *Transforming Government: People, Process and Policy.*

Permatasari, I. A., Nurmandi, A., & Wijaya, J. H. (2021). The Quality of Public Information on Twitter: Yogyakarta And DKI Jakarta Regional Government Comparison. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.20422/jpk.v24i1.722>

Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2), 236–255. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>

Setiawan, A. (2015). E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung. *PROSIDING KMSI*, 3(1), Article 1. <https://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/kmsi/article/view/364>

Susanti, E., Harta, R., Diana, B. A., & Utami, S. B. (2021). E-Readiness and The Effectiveness of E-Participation in Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 37(1), 138–149. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.6931>

Zuhroh, S. dan S. (2021). Implementasi E-Government: Dampaknya Pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4719373>